

Kelembagaan dalam Partisipasi Perencanaan Pembangunan di Desa Baebunta Kabupaten Luwu Utara

Hiswanto Pakasi
(Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur)
Email: anto_lee349@yahoo.co.id

Abstract

This research aims to assessed of countryside institutions participation in countryside development. The researcher used descriptive research that used non eksperimental and qualitative in statement of result the responders interview. Technique of collecting data were direct interview, observation, and documentation. The result of collecting data found that participation of society in countryside development was deputize by countryside institutions such as LKMD, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, and custom council that countryside. In countryside development, at the first time they made planning of development that entangle all of countryside institutions in musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Desa. (consultation of countryside development planning). The result of consultation would be entangle of society in process of development. The conclution of this research was society and countryside institutions participation was determining the success of countryside development. Government and countryside institutions should be realized their responsibility, duty, fuction and their positions and then made cooperative, coordination, consultation and communication for arrange countryside development planning.

Keywords: *partnership governance, waste, landfill Tamangapa*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menilai partisipasi kelembagaan desa dalam proses pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa diwakili oleh beberapa lembaga desa yang aktif, seperti, LKMD, Karang taruna, Tim Penggerak PKK, dan dewan adat yang ada di desa tersebut. Pada proses pembangunan desa, terlebih dahulu dibuat sebuah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh lembaga masyarakat yang ada di desa, yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) desa. Setelah dimusyawarahkan bersama maka akan menghasilkan beberapa rencana kegiatan pembangunan yang nantinya juga dalam pelaksanaannya akan melibatkan masyarakat. Disimpulkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dan lembaga desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan di sebuah desa. Diharapkan pemerintah dan lembaga desa senantiasa menyadari peran, tugas, fungsi dan posisi masing – masing serta bekerjasama, berkoordinasi, bermusyawarah, dan berkomunikasi yang baik dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa.

Kata kunci: *kemitraan governance, sampah, TPA Tamangapa*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di TPA perlu ditangani dengan baik karena dapat menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan. Sampah kota yang tidak dikelola dengan baik dan hanya membuang sampah tanpa penanganan khusus mengakibatkan munculnya gas hasil dekomposisi anaerobik sampah-sampah yang menyebabkan pencemaran udara. Salah satu fenomena penting bahwa keberadaan sampah di TPA juga memberikan kontribusi penting dalam pencemaran lingkungan adalah dihasilkannya lindi (leachate) dan gas metana. Pencemaran ini berpotensi muncul dari pengelolaan system terbuka atau open dumping umumnya memberikan permasalahan pada lingkungan khususnya lingkungan sekitar lokasi TPA seperti pertumbuhan vektor penyakit, pencemaran udara, pandangan dan bau tak sedap, asap pembakaran, pandangan dan bau tak sedap, pencemaran lindi, kebisingan dan dampak sosial (Damanhuri, 2010). Pelaksanaan pengelolaan persampahan sangat dipengaruhi komponen-komponen yang mendukung yaitu aspek teknis, kelembagaan, hukum atau peraturan, pembiayaan maupun peran serta masyarakat (Kodoatie, 2003)

Untuk mengatasi permasalahan persampahan ini, pemerintah kota tidak bekerja sendiri namun melibatkan swasta dan masyarakat bersama mengatasi permasalahan tersebut. Membangun infrastruktur penyediaan layanan publik tersebut memerlukan pembiayaan yang sangat besar. Pemerintah perlu mencari alternatif pembiayaan dari sektor swasta baik investor dalam negeri maupun luar negeri (Istianto, 2011). Olehnya itu yang menjadi perhatian dan fokus dalam penelitian ini adalah kerjasama pemerintah swasta dalam pengolahan sampah. dimana perusahaan yang berinvestasi di kota Makassar khusus di TPA Tamangapa yang menjadi bagian dari inisiatif Pemerintah Kota dalam

pengolahan sampah yang volumenya cukup besar.

Penelitian tentang kemitraan pemerintah swasta dalam pengelolaan sampah telah dilakukan sebelumnya diantaranya : Saputra, (2002) potensi kerjasama pemerintah dan swasta di dalam pelayanan pengelolaan sampah di Kota Batam Studi ini bertujuan untuk mengkaji bentuk kerjasama yang paling tepat untuk dilaksanakan di Kota Batam dari tiga bentuk kerjasama yang dikaji, yakni kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan dan kontrak konsesi.

Tesis Irwen, (2005) kajian tentang kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di kota Jambi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kemitraan dalam pengelolaan sampah. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pertama: pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi sampai saat ini masih ditemukan aspek yang belum efektif kedua: faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan serta faktor pelaksanaan kemitraan semuanya mempengaruhi efektifitas dalam pengelolaan sampah oleh pihak swasta.

Kemitraan Publik-Privat merupakan hubungan berbasis kontrak menentukan secara rinci tanggung jawab dan kewajiban masing-masing mitra (Linder, 1999). Olehnya itu Dalam Memorandum Of Agreement Nomor 660/032/S.Perja/DPLHK dan dalam Nomor MOA/05/XII.17/GKI/2007 Pemerintah Kota Makassar dengan PT.Gikoko Kogyo Indonesia sepakat mengadakan kontrak atau perjanjian kerjasama untuk meningkatkan pengelolaan persampahan Kota Makassar. melalui implementasi proyek Clean Development Mechanism (CDM) melalui pembakaran LFG dalam rangka mengurangi efek gas rumah kaca, melestarikan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dan membantu usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat pemulung di TPA Tamangapa dan penduduk sekitarnya sebagai usaha pemberdayaan

masyarakat, serta perbaikan kondisi lingkungan.

Dalam proses komunikasi dan konsultasi publik yang dilakukan pihak ERM bank dunia bersama dengan warga sekitar TPA, memunculkan keluhan dan harapan warga terhadap proyek LFG, warga complain kepada pemerintah tentang bau, ceceran sampah dari TPA dan truk pengangkut sampah serta kekuatiran menurunnya harga tanah akibat pencemaran lingkungan sehingga warga mengharapkan adanya penanganan dampak lingkungan. Selain itu warga juga berharap proyek ini mampu meningkatkan kesejahteraan hidup, peluang usaha, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan bagi anak pemulung dan juga prioritas pekerjaan bagi warga sekitar TPA. Disamping itu pemerintah kota juga mengharapkan proyek LFG dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan menekan pencemaran dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat kota Makassar (ERM Bank Dunia, 2007)

Dengan melihat fenomena dan kondisi empiris diatas menarik untuk mengkaji kemitraan antara pemerintah kota Makassar dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia dengan melihat pelaksanaan kemitraan maka akan diketahui output kemitraan ini yang dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kondisi lingkungan dan memberikan gambaran outcome dari kemitraan ini sehingga manfaat kemitraan bagi masyarakat sekitar TPA dapat tergambar melalui pelaksanaan kemitraan. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan kemitraan Pemerintah Kota Makassar dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia dalam mengatasi masalah persampahan dan manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar TPA Tamangapa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar

dan di TPA Tamangapa yang berlokasi di Kelurahan Tamangapa Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ditentukan secara Purposive, dengan melihat kesesuaian antara calon informan dengan informasi yang dibutuhkan. Artinya, informan yang akan dipilih adalah mereka yang betul-betul memiliki kompetensi tentang kemitraan publik-privat di TPA Tamangapa. Adapun mereka yang dimaksud ialah Sekertaris dan Staf bagian pengembangan Kapasitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala UPTD TPA Tamangapa, Kepala Konstruksi PT. Gikoko Kogyo Indonesia, Ketua Pemulung dan Penduduk sekitar TPA.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono,2011). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi Teknik wawancara, observasi (pengamatan) dan pengolahan data, yang kesemuanya terkait dengan kemitraan public-privat dalam pengelolaan sampah di TPA Tamangapa.

Teknik analisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono,2011). Adapun aktifitas dalam analisis data, yaitu Reduksi data (data reduction) Penyajian data (data display), dan Penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification) yang digunakan dalam melihat output dan outcome dari pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan sampah di TPA Tamangapa dan manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan kemitraan ini penulis

mengkajinya melalui indikator-indikator yang terdapat pada objek dan ruang lingkup kemitraan. Selanjutnya peneliti menjelaskan output dan outcome dari pelaksanaan kemitraan tersebut. Hal ini peneliti sesuaikan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui efektif tidaknya pelaksanaan kemitraan ini dalam mengatasi permasalahan persampahan di TPA Tamangapa. Adapun indikator pelaksanaan kemitraan antara pemerintah Kota Makassar dengan PT. Gikoko Kogyo adalah sebagai berikut :

Pengimplementasian proyek CDM

Pemerintah Kota Makassar dengan PT. Gikoko kogyo memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pengimplementasian proyek CDM ini salah satunya dengan melakukan penutupan sel di TPA memberikan kontribusi positif bagi pelestarian lingkungan. Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara yang memberikan gambaran bahwa penutupan sel dapat mengurangi bau sampah dan juga sel yang sudah ditutup dapat dimanfaatkan

oleh PT.Gikoko Kogyo untuk mengumpulkan gas yang ada didalamnya sehingga gas-gas yang berbahaya bagi lingkungan ini dapat diminimalisir risikonya.

Penyebab bau sampah di TPA adalah adalah sel-sel yang masih aktif sebagai tempat pembuangan sampah baru sementara sel-sel yang sudah tidak aktif atau ditutup sudah tidak mengeluarkan bau tidak sedap. Dari hasil wawancara diatas masalah bau sampah dapat diatasi dengan dilakukannya penutupan sel TPA sehingga bau sampah lama yang baunya menyengat dapat dikurangi walaupun tidak dapat mengatasi sepenuhnya masalah bau tidak sedap karena masih banyak sel aktif yang terus berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah baru dan belum dilakukan penutupan dengan tanah sehingga ketika ada pembongkaran atau penataan sehingga bau tidak sedap sewaktu-waktu tetap dapat dirasakan begitu juga resapan air di sel aktif yang terjadi saat hujan tidak dapat dihindari sehingga dapat menimbulkan bau sampah.

Matriks Pelaksanaan Kemitraan

Indikator Kemitraan	Pelaksanaan	Output	Outcome	Keterangan
Implementasi CDM	terlaksana	pengurangan efek rumah kaca pelestarian lingkungan	perbaikan kondisi lingkungan	10 % Pengurangan Emisi karbon
Pemberdayaan masyarakat pemulung	belum terealisasi	perbaikan kondisi sosial pemulung		menunggu royalti 7 % untuk kelanjutan program
Bimbingan Teknis untuk Dinas	terlaksana	perbaikan manajemen persampahan		hanya mencakup penataan TPA
Komersialisasi CDM	belum terealisasi			menunggu pembayaran CER

Namun dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar TPA dan pengamatan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa ma-

salah bau sampah dari truk pengangkut sampah, ceceran sampah, dan alat masih sering terjadi di TPA (lihat Matriks Pelaksanaan Kemitraan). Dari pelaksanaan implementasi CDM tergambar pencapaian output terkait pengurangan efek rumah kaca dan pelestarian lingkungan belum efektif mengatasi permasalahan persampahan di TPA Tama-

ngapa. Pencapaian pengurangan emisi karbon hanya mencapai 10 % kemudian outcome terkait perbaikan kondisi lingkungan memberikan manfaat pengurangan bau sampah tapi tidak mampu masalah bau sampah secara keseluruhan termasuk bau yang timbul dari mobil truk pengangkut sampah, ceceran sampah, dan alat.

Implementasi CDM yang salah satunya adalah pembangkit listrik skala kecil ini terlaksana seiring dengan pengumpulan dan pembakaran LFG di TPA walaupun hanya menyalakan listrik di lingkup TPA dan tidak masuk hingga rumah warga disekitarnya. Selama masa pengoprasian system pembakaran gas LFG di TPA Tamangapa yang memusnakan gas metan PT. Gikoko juga memberikan kontribusi bagi penerangan di sekitar TPA berupa lampu jalan yang bergantung pada energi gas dari timbunan sampah yang ada dan tentunya memberikan manfaat bagi pemulung yang beraktifitas malam hari.

Pemberdayaan masyarakat pemulung

Dalam perjanjian kerjasama pemerintah kota dengan PT. Gikoko Kogya terdapat objek kerjasama yang salahsatunya adalah program pemberdayaan pemulung dan penduduk sekitar TPA. Kegiatan pemerintah kota Makassar yakni membantu pembangunan dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat sekitar TPA termasuk didalamnya program pemberdayaan masyarakat, fasilitas umum dan sosial, juga pengembangan usaha kecil yang berkaitan dengan daur ulang sampah. Berdasarkan hasil wawancara kegiatan program pemberdayaan masyarakat pemulung dari aspek kemitraan ini tidak terealisasi karena hanya pihak pemerintah dan LSM yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan fasilitas umum dan social serta program pemberdayaan masyarakat di TPA Tamangapa hingga saat ini. Hal ini terjadi dikarenakan proses pencairan dana royalti sebesar 7 % yang digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dari hasil

penjualan CER belum terbayarkan oleh Bank dunia. Sehingga program pemberdayaan masyarakat pemulung belum dapat terealisasi dalam kemitraan ini. Hal ini menunjukkan bahwa output terkait peningkatan kondisi social pemulung di TPA tidak melibatkan kemitraan antara pemerintah kota Makassar dengan PT. Gikoko Kogya hal ini terjadi karena pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam MOA yang telah disepakati kedua belah pihak belum terlaksana berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa hal ini terkendala pembayaran CER. Matriks Pelaksanaan Kemitraan menunjukkan output perbaikan kondisi social pemulung belum terealisasi karena royalti 7 % dari penjualan CER belum diperoleh PT. Gikoko dari bank Dunia. Hal ini mengakibatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penyediaan fasilitas umum yang semestinya diperoleh masyarakat pemulung belum dapat terealisasi.

Bimbingan teknis strategi pengelolaan persampahan

Obyek pelaksanaan kemitraan ini salah satunya adalah bimbingan teknis strategi pengelolaan persampahan. Dalam perjanjian yang tercantum di MOA khususnya hal yang terkait pengembangan Manajemen persampahan yang menjadi kewajiban PT. Gikoko kogya adalah: (1) Membuat model percontohan dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah (2) Penataan ulang TPA Tamangapa untuk memenuhi persyaratan sanitary landfill (3) Bimbingan Teknis bagi manajemen dinas Kebersihan dan pertamanan. Dalam Matriks Pelaksanaan Kemitraan, dari pelaksanaan bimbingan teknis ini output yang diharapkan adalah perbaikan manajemen persampahan namun hal ini tidak sepenuhnya dilakukan secara menyeluruh dikarenakan scope pelaksanaan kemitraan ini lebih banyak berorientasi di wilayah TPA Tamangapa. Untuk penataan TPA sebagai sanitary landfill PT. Gikoko Kogya belum memberikan

kontribusi sementara untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Makassar. Kontribusi PT. Gikoko dalam bimbingan teknis dalam hal pengumpulan dan pengangkutan sampah belum terealisasi.

Kemudian kegiatan bimbingan tersebut dilakukan untuk mencapai target meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan termasuk meningkatkan volume sampah yang masuk ke TPA 5 % pertahun. Dari hasil wawancara yang dilakukan baik dari pihak Pemerintah Kota dan PT. Gikoko kogyo menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan ini belum terlaksana hal ini dikarenakan kemitraan ini lebih banyak berfokus pada manajemen penataan TPA belum mampu menyentuh scope yang lebih luas yakni pengelolaan sampah secara menyeluruh termasuk dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah yang masuk ke TPA tamangapa. dinas kebersihan dan pertamanan kota yang memegang peranan sepenuhnya belum melibatkan PT. Gikoko Kogyo dalam manajemen persampahan secara menyeluruh. Output dari pengembangan manajemen persampahan tidak dapat tercapai dikarenakan royalty yang seharusnya diterima pemerintah kota dari hasil pembelian CER oleh bank dunia sebesar 10 % yang akan digunakan untuk meningkatkan kinerja persampahan belum dapat teralisasi hal tersebut menjadikan kemitraan ini sulit untuk mengembangkan strategi manajemen persampahan yang lebih efisien dan efektif.

Komersialisasi CDM

Selain pengimplementasian CDM yang memberikan dampak bagi pengurangan emisi gas yang berpengaruh pada efek rumah kaca yang berorientasi pada pelestarian lingkungan ada juga hal yang patut untuk diperhatikan yakni potensi komersial yang dihasilkan dari penjualan CER. Namun dalam penjualan CER ini memiliki tahap-tahap yang

harus dilalui sebelum sampai pada penerbitan CER itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan kurang transparannya proses komersialisasi CDM ini memunculkan pandangan negatif pemerintah kota Makassar terhadap proyek CDM hal ini disebabkan oleh proses penerbitan CER berjalan hanya melibatkan PT.Gikoko dengan pihak bank dunia sementara pemerintah kota tidak terlibat didalamnya. Fenomena ini terjadi karena pengawasan pemerintah kota Makassar yang tidak ada dalam kemitraan ini. Termasuk didalamnya pengawasan mengenai pembakaran emisi gas sepenuhnya hanya PT. Gikoko yang melakukan tanpa pengawasan mitra yang diajak bekerjasama.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan belum efektif dalam mengatasi permasalahan persampahan di TPA Tamangapa hal ini terlihat dari Output terkait pengurangan efek rumah kaca dan pelestarian lingkungan ini belum dapat tercapai secara maksimal hal ini dapat ditunjukkan melalui hasil pembakaran gas LFG yang mencapai 10 % dari estimasi awal yang ingin dicapai. Dari pelaksanaan kemitraan yang terjalin selama ini seharusnya dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan kondisi lingkungan. Namun masalah-masalah persampahan seperti bau tak sedap yang muncul dari truk pengangkut sampah terbuka, ceceran sampah, lalat dan masalah air limbah tidak mampu teratasi secara maksimal dalam kemitraan ini.

Hal ini terjadi karena sinergi yang terjalin antara pihak yang bekerjasama hanya terfokus pada proyek LFG yang mengedepankan pemusnahan gas metan yang memiliki nilai komersial dan berdampak global bagi efek rumah kaca. Sementara untuk tahapan perbaikan manajemen pengelolaan TPA Tamangapa sendiri belum mampu tersentuh padahal untuk mengatasi permasalahan persampahan harus memperbaiki metode pengelolaan TPA, metode terbaik saat ini adalah sanitary landfill hal ini yang didorong

dalam kemitraan ini mengingat pengelolaan TPA Tamangapa belum meninggalkan cara lama yaitu open dumping metode tersebut seharusnya tidak digunakan lagi karena berbahaya bagi lingkungan menimbulkan pencemaran udara, tanah, resiko kebakaran, dan lahan TPA yang menggunakan open dumping tentu tidak dapat digunakan.

TPA Tamangapa saat ini masih menggunakan sebagian open dumping dan sebagian control landfill sementara fasilitas sanitary landfill tidak mampu dimanfaatkan untuk dikelola di TPA Tamangapa. hal ini menjadikan penanganan masalah lingkungan masih belum maksimal dilakukan di TPA Tamangapa. Namun upaya penutupan sel yang menjadi bagian dari kemitraan yaitu dengan menutup sebagian sel sampah aktif yang berada dekat pemukiman warga sekitar hanya mampu mengurangi bau sampah yang sumbernya dari dalam TPA.

Penelitian ini juga menunjukkan manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar TPA hal ini terlihat dari outcome yang diperoleh dari pelaksanaan kemitraan ini terkait dengan perbaikan kondisi lingkungan yang memberikan manfaat kepada masyarakat berupa pengurangan bau sampah di TPA Tamangapa walaupun berdasarkan hasil wawancara pengurangan bau sampah tidak begitu signifikan menunjukkan dampak perubahan namun area tertentu sudah tidak lagi memberikan dampak berupa bau tidak sedap karena sel yang sebelumnya jadi zona aktif pembuangan sampah yang berdekatan dengan rumah warga sekitar sudah di tutup. Kemudian manfaat lain yang diperoleh masyarakat sekitar dari pelaksanaan kemitraan yakni kemudahan beraktifitas di malam hari melalui penerangan listrik yang dialirkan dari sumber daya gas sampah TPA yang mampu menerangi wilayah sekitar dan memudahkan aktifitas masyarakat pemulung di malam hari.

Selain pembahasan output dan outcome dari kemitraan ini peneliti juga memaparkan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan

kemitraan yakni tidak adanya transparansi dalam proses komersialisasi CDM memunculkan pandangan negatif pemerintah kota Makassar terhadap proyek CDM ini, hal ini disebabkan oleh proses penerbitan CER berjalan hanya melibatkan PT.Gikoko Kogyo Indonesia dengan pihak bank dunia sementara pemerintah kota tidak terlibat didalamnya. prinsip kerjasama perlu memperhatikan aspek-aspek keadilan, keterbukaan, transparansi, persaingan yang sehat, akuntabel dan saling menguntungkan (Utama, 2013). Fenomena ini terjadi karena pengawasan pemerintah kota Makassar yang tidak ada dalam kemitraan ini. Termasuk didalamnya pengawasan mengenai pembakaran emisi gas sepenuhnya hanya PT. Gikoko Kogyo yang mengetahui semua kegiatan terkait pembakaran emisi dan proses verifikasi sementara tidak ada wakil pemerintah kota yang dipersiapkan untuk melakukan pengawasan terhadap proyek CDM ini.

Kemudian tidak berjalannya investasi pendanaan atau kelangsungan pendapatan yang diperoleh dari CER berupa royalti yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen persampahan mengakibatkan program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen persampahan secara menyeluruh tidak dapat terealisasi dalam perjanjian kerjasama ini. Padahal pendanaan dan kontribusi dalam kemitraan ini telah dibagi dalam tiga tahap : tahap pertama pemasangan system LFG, tahap kedua meningkatkan manajemen TPA, dan tahap ketiga merupakan perluasan dari manajemen persampahan atas dasar kegiatan/program yang telah disepakati bersama. Padahal terjamin kelangsungan pendapatan yang stabil merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pelaksanaan kemitraan publik-privat (Griffin, 2009). Sementara pelaksanaan kemitraan ini belum menunjukkan kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak hal ini terlihat dari belum terbayarnya CER oleh bank dunia

yang menjadi keuntungan pihak swasta padahal prinsip dasar kemitraan seharusnya saling memberikan manfaat berdasarkan syarat dasar kemitraan yang menginginkan adanya prinsip (win-win) saling menguntungkan antara pemerintah dengan swasta (Zhang, 2005). Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan menunjukkan pendanaan dan kontribusi dalam kemitraan ini belum menyetujui tahap meningkatkan manajemen TPA dan kegiatan/ program pemberdayaan masyarakat. yang dapat dituntaskan hanya pada tahap pertama yaitu pemasangan sistem LFG. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kelangsungan pendapatan yang stabil mengakibatkan pelaksanaan kemitraan ini tidak dapat menyentuh tahap kedua dan ketiga pelaksanaan kemitraan ini.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kemitraan yang dilakukan hanya terfokus pada proyek LFG, sementara pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan manajemen persampahan yang tertuang dalam MOA belum terlaksana karena terkendala royalti dari pembayaran CER. Kemudian metode sanitary landfill sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan tidak dapat dikelola dalam kemitraan ini. Hal tersebut menyebabkan masalah-masalah persampahan seperti bau tak sedap yang muncul dari truk pengangkut sampah terbuka, ceceran sampah, alat dan masalah air limbah belum mampu teratasi secara menyeluruh sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kemitraan antara pemerintah kota makassar dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia tidak efektif dalam mengatasi masalah persampahan di TPA. kemudian Pelaksanaan kemitraan terkait dengan perbaikan kondisi lingkungan yang memberikan manfaat kepada masyarakat berupa pengurangan bau sampah di TPA Tamangapa dan keberadaan penerangan yang ada di TPA dapat membantu aktifitas penduduk yang

ada di sekitar TPA Tamangapa diwaktu malam hari meskipun lampu yang ada tidak menerangi seluruh lokasi TPA namun penerangan pada akses masuk dan sekeliling TPA memberikan kenyamanan kepada pemulung untuk berjalan masuk kedalam TPA dan memudahkan melakukan pekerjaan pengumpulan di malam hari.

Oleh karena itu untuk memperbaiki pencapaian output dan outcome dari kemitraan ini maka dapat disarankan melakukan pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaan proyek LFG agar kedua belah pihak dapat terfokus pada tanggung jawab dari pelaksanaan kemitraan ini sesuai yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Dibutuhkannya transparansi dalam hal pembayaran CER yang melibatkan pihak ketiga dalam hal ini bank dunia agar kepercayaan antar pihak yang terlibat tetap terjaga. Sehingga kemitraan ini dapat melanjutkan program-program yang belum terealisasi dengan mengedepankan kepercayaan pada masing-masing mitra. Dibutuhkan kebijakan dari pemerintah kota yang menjamin kelanjutan kerjasama setelah berakhirnya perjanjian ERPA antara PT. Gikoko Kogyo dengan Bank Dunia agar tidak merugikan salah satu pihak yang bermitra dan mencari jalan investasi tambahan yang lebih *profitable*.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri. (2010). Diktat Kuliah : Pengelolaan Sampah. Bandung: Program Studi Teknik Lingkungan ITB.
- Environmental Resources Management. (2007). Laporan uji tuntas sosial proyek LFG TPA Makassar, Bank Dunia.
- Griffin, Hanh Lee. (2009), Port Operating Efficiency and Capacity Improvement : Case Study of Container Terminal Development Utilizing Public Private Partnership, University Southern California USA.

- Irwen. (2005), Kajian kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi. Tesis Magister. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Istianto, B. (2011), Privatisasi dalam model Public Private Partnership, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kodoatie J. R. (2003), Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Linder S. H. (1999), Coming to Terms with The Public Private Partnership American Sciences, University of Texas, Houston: Sage Publication Inc.
- Saputra, D. (2002) Studi potensi kerjasama pemerintah dan swasta di dalam pengelolaan sampah di kota batam. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2011). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Utama, D. (2010), Prinsip dan Strategi Penerapan “public private partnership” dalam penyediaan infrastruktur transportasi. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia vol. 12.
- Zhang, X. Q. (2005) “Critical Success Factor For Public Private Partnerships in Infrastructure Development” Journal of Construction Engineering and Management.

